

Jokowi Kenalkan Basuki Sebagai Plt Kepala Otorita IKN ke Investor

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada para undangan dan investor yang hadir dalam groundbreaking Astra Biz Center dan Botanical Garden di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).

Tak hanya Basuki, Jokowi juga memperkenalkan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Otorita IKN. Momen itu terekam saat Jokowi menyampaikan salam dalam sambutan pembukanya.

"Kepala otorita dan wakil kepala otorita yang baru saja dilantik," kata Jokowi.

Basuki yang duduk di baris pertama dan Raja Juli di baris kedua langsung berdiri dan membungkuk menyapa para tamu undangan yang

hadir.

Jokowi kemudian melanjutkan sapaannya kepada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Penajam Paser Utara, Panglima TNI, Direktur PT Astra International Tbk, hingga Ketua Konsorsium Nusantara.

Dalam sambutannya, Jokowi mengaku senang dan mengapresiasi komitmen PT Astra International Tbk yang mendukung IKN dengan membangun Astra Biz Center.

"Komplek layanan yang terintegrasi one stop service di atas lahan seluas hektare yang akan melayani 11 merek perusahaan dari grup Astra," jelas Jokowi.

Tak hanya Astra Biz Center, Jokowi juga mengapresiasi pembangunan Botanical Garden yang dilaksanakan oleh Konsorsium Nusantara. ● han

Ahmad Sahroni Sebut Surya Paloh Lelah oleh Pemberitaan Fakta Persidangan SYL

JAKARTA (IM) - Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, lelah dengan pemberitaan fakta persidangan kasus korupsi kadernya yang merupakan Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), terkait ramainya kasus yang membawa nama baik Partai Nasdem ini.

Sahroni mengatakan hal ini saat dicecar oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh, dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan terdakwa SYL dan dua anak buahnya.

"Apakah saudara pernah enggak dirapatkan setelah beliau jadi tersangka, ini kan viral dimana-mana, kan nama baik Nasdem dibawa kemana-mana. Apakah pernah ada dipanggil Ketua Partai dan membicarakan masalah ini?" kata Rianto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (5/6).

Sahroni kemudian menjawab bahwa Surya Paloh lelah dengan pemberitaan fakta persidangan yang setiap hari diberitakan oleh awak media.

"Siap Yang Mulia, Ketua Umum sudah capek Yang Mulia, sudah capek melihat beritanya," ucap Sahroni.

Rianto kemudian men-

cecar, uang negara yang dirampas oleh SYL seharusnya dibahas oleh Nasdem dan partai semestinya bertanggungjawab oleh kader partainya itu. Sebab, aliran dananya masuk dalam kegiatan-kegiatan partai Nasdem, seperti sumbangan bencana hingga sumbangan sembako.

"Masalahnya ini kan uang negara, apakah ada keinginan dari Partai mengembalikan itu, karena ini kepentingan partai, selain dari Rp 860 juta yang saudara bayar tercatat, tapi yang lain apakah ada keinginan. Ini kan uang negara," tutur Rianto.

"Ijin yang mulia, terkait dengan kalau kami tau jumlahnya seperti sebelumnya uang Rp 860 juta kemungkinan kalau kami tau kami kembalikan. Masalahnya kami tidak tahu yang mulia," jawab Sahroni.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Syahrul menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras

anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Pemerasan ini dilakukan Syahrul dengan memerintahkan Kasdi Subagyono, Muhammad Hatta; Staf Khusus Bidang Kebijaksanaan, Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudannya, Panji Harjanto. ● han

Longsor di Lumajang, Satu Korban Meninggal Dunia, Tiga Masih Hilang

JAKARTA (IM) - Tanah Longsor melanda wilayah Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur pada Selasa (4/6) pukul 11.15 WIB. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, satu korban meninggal dunia.

"Korban ditemukan sekitar pukul 15.30 WIB dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara itu, akibat kejadian ini terdapat tiga orang yang masih dinyatakan hilang dan masih dalam tahap pencarian," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Rabu (5/6).

Operasi pencarian akan dilanjutkan esok hari (5/6) dengan menyalisir sekitar lokasi pertambangan pasir. Adapun lokasi longsor diketahui berada di Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan

Pronojiwo.

Peristiwa ini juga dilaporkan berdampak kerusakan materil berupa dua unit truk yang tertimbun longsor. BPBD Lumajang bersama dengan jajaran unsur TNI-Polri, Forkompimcam Pronojiwo, Dinkes P2KB Lumajang, Satpol PP Lumajang, Basarnas Pos SAR Jember dan Relawan segera melakukan evakuasi dan penanganan darurat di lokasi.

Merujuk prakiraan cuaca BMKG untuk dua hari kedepan (6/6) wilayah Kabupaten Lumajang berpotensi cerah berawan, meski demikian diimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi longsor susulan. Terlebih bagi tim gabungan yang akan melanjutkan operasi pencarian untuk tetap mematuhi prosedur keselamatan. ● meci

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



PANGDAM XVI/PATTIMURA TEMUI PENGUNSI GUNUNG IBU

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial (kanan) berbincang dengan pengungsi usai memberikan bantuan sosial di Posko Pengungsian di Desa ternate asal Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu (5/6). Mayjen TNI Syafrial menuju Halmahera Barat untuk melihat secara langsung kondisi para pengungsi yang terdampak Gunung Ibu sekaligus memberikan bantuan logistik.

Pimpinan KPK Sentil Komisi Kejaksaan, Dianggap Masuk "Pekarangan" Lembaga Lain

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ingatkan tugas Komjak adalah mengawasi, memantau, menilai kinerja dan perilaku jaksa serta atau pegawai Kejaksaan.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron sentil Komisi Kejaksaan (Komjak) agar tidak masuk "pekarangan" orang dengan meminta lembaga antirasuah bersurat pada Jaksa Agung.

Komjak mengatakan, melalui surat itu, KPK meminta Jaksa Agung memberikan delegasi wewenang agar bisa

mengadili perkara gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung Gazalba Saleh.

"Tak perlu Komjak itu masuk pada pekarangan wewenang lembaga lain," kata Ghufron kepada wartawan, Rabu (5/6).

Ghufron mengingatkan, Komjak bertugas mengawasi, memantau, menilai kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai di ling-

potkan diri," tutur Ghufron. Ghufron juga menilai pernyataan Komjak yang meminta KPK segera meminta delegasi kepada Jaksa Agung menunjukkan mereka menyetujui putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor yang dinilai ganjil.

"Sangat terang terbac publik ini merugikan Komjak sendiri," tutur Ghufron. Selain itu, Ghufron juga meminta pihak Komjak membaca Pasal 8 Undang-Undang KPK yang menyatakan Lembaga Antirasuah merupakan koordinator pemberantasan korupsi.

Sementara pada Pasal 6 b menyatakan, tugas KPK melakukan koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan tindak pidana korupsi dan pelayanan publik. Kemudian, Pasal 8 menjelaskan Pasal 6 b bahwa KPK berwenang mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi.

KPK bahkan bisa memin-

ta informasi kegiatan pemberantasan korupsi dan meminta laporan kepada instansi berwenang seperti Kejaksaan dan kepolisian untuk mencegah perbuatan rasuah.

"Koordinator pemberantasan korupsi itu KPK," kata Ghufron.

Sebelumnya, Ketua Komjak, Pujiono Suwadi meminta KPK menyurati Kejaksaan Agung untuk memenuhi kebutuhan administrasi delegasi penuntutan. Jika langkah itu ditempuh maka sengketa kelembagaan akan selesai.

Ia juga menyebut ketentuan pendelegasian itu bisa dilihat dalam Pasal 12A, Pasal 21 dan Pasal 24 Undang-Undang KPK yang baru, atau revisi UU KPK.

"Jadi menurut saya, surat saja Jaksa Agung meminta pendelegasian penuntutan. Saya yakin Jaksa Agung akan segera memproses dalam tempo secepat-cepatnya," kata Pujiono saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (4/6) kemarin. ● han

SIDANG KASUS KORUPSI TOL MBZ

Ahli Geometri Bingung Ada Landaian di Tol MBZ Setiap 300 Meter: Tak Lazim

JAKARTA (IM) - Ahli Geometri dari Universitas Gajah Mada, Imam Muthohar menyatakan prinsip utama dalam mendesain jalan tol terlebih jalan tol layang harus datar.

Imam mengungkap hal tersebut saat menjadi saksi ahli dalam sidang kasus korupsi proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II.

Awalnya, Imam menyatakan pernah mensurvei jalan tol tersebut dan mendapati adanya catatan terkait banyaknya kelandaian yang menyebabkan jalur menjadi bergelombang.

"Kami mencatat dari km9+500 sampai 28+500 yaitu notabene sekitar 17 kilo, ada sekitar kurang lebih 53 kelandaian. Kelandaian itu bisa kelandaian cembung, bisa kelandaian

cekung, jadi bisa tanjakan bisa turunan.

"Artinya kalau kita bagi 17 kilo ini dibagi 53 kelandaian, setiap 300 meter itu ada kelandaian," kata Imam di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (4/6).

Menurutnya, kelandaian itu tidak lazim. Pasalnya, selama ia menekuni ilmu teknik sipil, prinsip utama desain jalan tol layang adalah datar.

"Ini yang tidak lazim, sepanjang yang saya pelajari dari S1 sampai dengan S3 kami belajar di luar negeri, desain jalan tol itu apalagi kalau layang, seandainya sebaiknya adalah lurus dan datar, itu adalah prinsip utama kalau kita ingin mendesain jalan tol layang," ujarnya.

Sekadar informasi, mpat

orang telah ditetapkan tersangka oleh Kejagung dalam perkara tersebut. Kini, tengah menjalani persidangan dan berstatus terdakwa.

Mereka adalah Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas; bekas Dirut PT Jasa-marga Jalan Layang Cikampek (JJC), Djoko Dwijono; Ketua Panitia Lelang PT JJC, Yudhi Mahyudin; dan Staf Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting, Tony Budianto Sihite.

Djoko dkk didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp510 miliar. ● han

Keluhkan Anggaran Dikit tapi Kerjaan Seabrek, Luhut: "Selawe Njaluk Selamet"

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeluhkan anggaran di kementeriannya dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (5/6).

"Selawe njaluk selamet," kata Luhut menggunakan perumpamaan dalam bahasa Jawa.

Perumpamaan itu disampaikan Luhut untuk menggambarkan banyaknya pekerjaan yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tetapi tidak didukung dengan anggaran yang mencukupi.

Awalnya, Luhut memastikan bahwa penyerapan anggaran di Kemenko Marves cukup tinggi. Namun ia mengeluhkan soal anggaran.

"Kami ini terus terang bapak ketua, ya ini 'selawe njaluk selamet' ya di Kemenko Marves itu, anggarannya sedikit, permintaannya banyak, kerjanya seabrek. jadi kita mohon banget pada teman-teman di banggar untuk memperhatikan mengenai ini," kata Luhut dikutip, Rabu (5/6).

Bahkan Luhut membeberkan bahwa ia terkadang mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk membayar hotel saat melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Bahkan, Luhut menceritakan kondisi kotornya yang seperti gudang karena tidak ada biaya untuk melakukan renovasi.

"Kalau bapak datang ke kantor saya di lantai 21 itu kayak gudang Pak. Kita mau cari Rp 20 miliar saja untuk

merenovasi itu enggak ada. Jadi, saya kadang-kadang, saya malah pernah bayar sendiri uang hotel saya karena kekurangan anggaran, enggak ada (anggaran)," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Luhut meminta bantuan Banggar DPR agar mempertimbangkan kondisi tersebut terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Luhut juga mengungkapkan kekesalannya karena telah berulang kali meminta anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetapi tidak disetujui.

"Ini kalian enak saja, penerimaan kalian kami bantu dengan target simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batubara) dengan segala macam, kalian kasih Rp 20 miliar saja susah, ah enggak beres kau dalam artian. Enggak adil menurut saya. Saya berani ngomong itu karena saya pikir I Prove it. Saya deliver apa yang harusnya," kata Luhut.

"Karena saya juga sudah minta ke Menteri Keuangan juga ini Pak. Jadi capek juga saya," ujarnya melanjutkan. ● han



PEMUSNAHAN BARANG BUKTI KEJAKSAAN

Petugas meninjau barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali, Rabu (5/6). Kejaksan Negeri Denpasar memusnahkan berbagai barang bukti tindak pidana diantaranya berupa 3,4 kg sabu, 28 kg ganja, senjata tajam dan ribuan obat-obatan ilegal dari 348 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap pada periode Oktober 2023 hingga Juni 2024

mandiri

PENAWARAN PENGAHLIAN PIUTANG (CESSIE)

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk akan melakukan penjualan/pengalihan piutang (cessie) terhadap debitur sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Alamat	Jumlah Kewajiban (per 03-06-2024)	Agunan Kredit
1	Melati Jaya	Jl. Bangun Nusa Raya No. 12 Cengkareng Timur Jakarta Barat	Rp.544.658.954,00.	<ul style="list-style-type: none"> SHGB No. 85/Warakas a.n. Thahir Abdy, LT. 184 m², di Jl. Warakas IV Gang 2 No. 56 a, RT. 004, RW. 006 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara SHM No. 171/Bojongmangu a.n. Thahir Abdy, LT. 1.350 m² Desa Bojongmangu, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi Jawa Barat SHM No. 67/Ridogalih a.n. Angkasah, LT. 1.090 m² Desa Ridogalih, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi, Jawa Barat

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan piutang Bank tersebut di atas, dapat menyampaikan penawaran dengan menghubungi alamat di bawah ini paling lambat tanggal 21 Juni 2024.

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
 Retail Collection & Recovery Group
 Collection & Recovery Center Jakarta
 Wisma Mandiri II Lt. 17
 Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta 10340

Demikian untuk diketahui semua pihak.

Jakarta, 06 Juni 2024
 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
 Collection & Recovery Center Jakarta

PENGUMUMAN

Memenuhi ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan kepada pihak manapun yang berkepentingan bahwa seluruh pemegang saham PT REKA JAYA KREASINDO berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"), akan melaksanakan penjualan atas seluruh sahamnya.

Bagi pihak manapun yang memiliki lighan terhadap Perseroan atau keberatan terhadap penjualan seluruh saham tersebut, mohon segera dapat meyakinkannya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, ke alamat:

Jln. Taman Surya Boulevard Taman Surya 2 Blok C2 No. 6, Jakarta Barat.

Terima kasih atas perhatiannya.
 Direksi
 PT REKA JAYA KREASINDO